

Analisis Pengukuran Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah: Kekuatan bagi Penanganan Covid-19 Berbasis Masyarakat

Dr. Muslim Mufti, M.Si.¹, Dr. H. Asep A. Sahid Gatara, M. Si.², Astri Afrilia, S.Si., M.Stat.³, Rina Mutiarawati, S.Pd., M.Pd.⁴

¹Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, muslimmufti@uinsgd.ac.id

²Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, asepsahidgatara@uinsgd.ac.id

³Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, astriafrilia88@uinsgd.ac.id

⁴Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, rinahjiewan@mail.com

ABSTRAK

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan pandemi yang dirasakan dampaknya oleh hampir seluruh warga masyarakat Indonesia. Dampak tersebut tidak hanya pada aspek kesehatan dan keselamatan hidup, melainkan dapat dirasakan pada aspek sosial, ekonomi dan politik. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanganinya, seperti pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, sejauh ini belum menunjukkan efektivitas sebagaimana mestinya (republika.co.id, 28/4/2020). Sehingga sangat berpotensi mempengaruhi kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap pemerintah dan keberlangsungan serta keberhasilan kebijakan yang ditetapkannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai kekuatan politik yang memiliki betugas meramu berbagai unsur dalam masyarakat dan ragam kepentingan agar percepatan penanganan Covid-19 tercapai. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini diambil dari populasi masyarakat Jawa Barat. Sampel tersebut dibagi pada 5 kluster masyarakat, yakni *civil society*, partai politik, pengusaha, Aparatur Sipil Negera (ASN), dan masyarakat umum. Penelitian ini terbatas pada sampel yang digunakan dengan *margin of error* sebesar 10%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah adalah rata-rata 3,27% atau ekuivalen cukup rendah. Namun demikian, pada kluster partai politik, ASN dan masyarakat umum menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi atau percaya. Ini menjadi modal penting, baik sebagai peluang maupun tantangan, bagi kebijakan percepatan penanganan Covid-19.

Kata Kunci : Covid-19, Kepercayaan Publik, Kekuatan Politik, Partisipasi Masyarakat

ABSTRACT

Covid-19 or corona virus is a pandemic that is being felt by almost all Indonesian citizens. The impact is not only on the safety aspects of people's lives but also on social, economic and political aspects. Multiple efforts made by the central government to local governments. One of the efforts is Large Scale Social distancing. Unfortunately, the efforts have not provided the effectiveness as they should be. It potentially affects the public trust on the government performance. The purpose of this study is to determine the extent of public trust on government as a political power in achieving the acceleration of handling Covid-19. The research method used in this study is a descriptive method with a quantitative approach. The sample taken from population of West Java and categorized it into five clusters. They are Civil Society, Political parties, Entrepreneurs, Civil Servants, and General public. The sample of this research is limited to margin error 10%. The result showed that, as a whole, the rank of Public Trust to the government is about 3.27%, it means that there is a lack of Public Trust since it is equivalent with the low rank of trust. Whereas, in the cluster of political parties, civil servant, and public society, it showed the high rank of trust. However, this presents an opportunity and a challenge for the acceleration of community-based covid-19 handling policies.

Keywords : Covid-19, Public Trust, Political Power, Society Participation

PENDAHULUAN

Pemberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah dinilai belum efektif. Hal itu misalnya disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Bambang Soesatyo, seperti dilansir oleh media massa republika.co.id pada hari Selasa, 28 April 2020. Ia mengatakan bahwa penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek) yang dinilai belum cukup efektif memutus mata rantai penyebaran Covid 19. Sebab menurutnya, jumlah kasus positif Covid-19 masih tinggi di wilayah Jabodetabek (Soesatyo, 2020).

Hal serupa juga diakui oleh Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 DKI Jakarta, Catur Laswanto, yang menyatakan pelaksanaan PSBB di Jakarta belum efektif menekan penyebaran infeksi covid-19. Menurutnya, kepatuhan masyarakat selama PSBB rendah. Masih banyak warga ke luar rumah, berkerumun, dan tidak menggunakan masker sehingga pertumbuhan kasus covid-19 terus terjadi (Laswanto, 2020).

Dalam suasana darurat seperti ini, yang selalu dibutuhkan masyarakat adalah kebijakan sebagai intervensi pemerintah. Di samping itu, rakyat butuh ketegasan dan keteladanan pemerintah dalam implementasi di lapangan. Dimana pun kebijakan dibuat tidak dalam ruang hampa, melainkan dalam ruang berkonteks kebudayaan, sejarah, ekonomi, struktur sosial, hukum, dan kontestasi kepentingan. Tugas politik adalah meramu berbagai unsur dan ragam kepentingan tersebut agar tujuan bernegara tercapai (Satria, 2020).

Tugas politik tersebut di antaranya dimiliki oleh negara melalui pemerintah yang melekat dengan kekuasaan dan kewenangannya. Di sini pemerintah sebagai kekuatan politik. Yaitu, kekuatan yang melekat dengan kekuasaan dan kewenangannya untuk membuat kebijakan yang di dalamnya terdapat berbagai unsur bermasyarakat dan bernegara serta ragam kepentingan masyarakat yang setiap saat berkontestasi. Oleh sebab itu, kebijakan berada dalam ruang politik. Lalu, bagaimana kepercayaan publik bisa menjadi landasan pokok sebuah kebijakan?

Memang membendung pesatnya laju penyebaran pandemi virus corona (Covid-19) tidak bisa dengan kebijakan biasa seperti parsial, sendiri-sendiri apalagi setengah-setengah. Namun ia harus dengan kebijakan luar biasa yang menekankan komprehensif dan terpadu. Hal itu mengingat Covid-19 telah menjadi pandemi dunia sejak kemunculan pertama kalinya pada awal Desember 2019 di Wuhan, Provinsi Hubai, Tiongkok.

Kebijakan komprehensif artinya, permasalahan harus cepat dan terus dipetakan secara menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir. Dan, harus bisa ditemukan mata rantai dari episentrum pemunculan, siklus penularan, pemetaan warga dan wilayah terpapar, proses penanganan melalui memutus mata rantai penularan sampai pada menemukan vaksinnnya.

Sementara kebijakan terpadu menunjukkan bahwa pihak-pihak pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga-lembaga negara terkait mesti satu alur koordinasi. Tidak boleh ada yang melenceng sedikitpun dari komando yang telah digariskan bersama. Namun sayang, sejauh ini kita lebih banyak dengar diskoordinasi dan disharmoninya. Satu daerah misalnya pernah menyatakan kebijakan *lockdown*, sementara daerah sekitarnya tidak *lockdown*. Demikian juga pemerintah pusat sejauh ini tetap bergeming tidak akan ada *lockdown*, dan akhirnya menetapkan PSBB.

Selain itu, kebijakan terpadu juga dibutuhkan tidak hanya dengan para pemangku kepentingan dalam negeri, namun juga dengan para pemangku kepentingan di negara-negara lain dan organisasi internasional karena sifatnya yang sudah pandemi. Di sini dibutuhkan kerja sama global.

Demikian juga, kebijakan terpadu tidak hanya antara para pemangku kepentingan penyelenggara negara, namun juga dengan masyarakat. Kebijakan terpadu itu misalnya, bisa ditunjukkan dalam bentuk partisipasi masyarakat untuk senantiasa disiplin mengikuti

himbauan-himbauan otoritas yang khusus ditunjuk oleh otoritas negara. Seperti untuk tinggal di rumah (*stay at home*), ibadah di rumah (*pray at home*), bekerja dari rumah (*work from home*), studi dari rumah (*study from home*), penjarakan sosial (*social distancing*), dan sebagainya. Di sinilah dibutuhkan adanya kepercayaan masyarakat untuk mewujudkannya.

Kebijakan terpadu yang disebutkan terakhir dikenal sebagai pencegahan Covid-19 berbasis masyarakat. Ini artinya, menurut Arif Satria, bahwa masyarakat akan menjadi garda depan dalam pencegahan (Satria, 2020). Sedangkan dalam portal resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 disebut dengan “Melawan Covid-19 Berbasis Masyarakat”.

Masyarakat menjadi garda terdepan karena belum adanya ketidakpastian kapan Covid-19 berakhir. Sejauh ini, memang belum ada sains atau hasil penelitian ilmiah yang bisa memprediksi secara akurat kapan puncak pandemi Covid-19, yang kemudian bisa menganalisis tren penurunan dan penanda akhir dari pandemi. Karena itu, masyarakat harus terlibat dalam pencegahan melalui peningkatan solidaritas sosial dan kerja sama seperti gotong royong atau pun *sabilulungan*.

Selain itu, negara pun, dalam hal ini pemerintah, memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu dalam penanganan Covid-19. Di antaranya keterbatasan sumber daya tenaga dan sarana kesehatan, dan juga keterbatasan sumber daya finansial. Kita tahu bahwa memilih kebijakan PSBB bukan karantina wilayah, selain pertimbangan filosofis dan politis seperti stabilitas keamanan dan pertahanan negara, juga karena pertimbangan kemampuan finansial. Jika PSBB hanya himbuan moral perlu adanya Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*), maka karantina wilayah menurut UU No 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan ada himbuan normatif yang mewajibkan negara untuk menyediakan kebutuhan dasar manusia selama karantina wilayah diberlakukan, termasuk ternak-ternak peliharaannya.

Di atas semua itu, bentuk penanganan Covid-19 dalam masa ketidakpastian adalah pencegahan. Bentuk penanganan ini senantiasa melibatkan semua lapisan masyarakat. Dan, bentuk penanganan yang mengutamakan tindakan memutus mata rantai pergerakan penularan Covid-19.

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam penanganan Covid-19 adalah bagian dari aktivitas masyarakat perihal kebijakan. Menurut Randall B. Ripley (Ripley, 1985), sebagaimana dikutip Ramlan Surbakti, aktivitas masyarakat yang menyangkut kebijakan, saling mempengaruhi dengan aktivitas pemerintah. Pemerintah menetapkan kebijakan, masyarakat mendapatkan dampak dalam arti siapa yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan siapa saja yang memetik manfaat dari kebijakan (Surbakti, 1992). Pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dalam konteks lingkungan tertentu untuk menyusun kebijakan umum. Seperti, apa yang dilakukan pemerintah dalam penanganan Covid-19 turut ditentukan oleh apa yang dilakukan masyarakat dalam segala aktivitas pada masa pandemi Covid-19.

Keterlibatan masyarakat sebagai bentuk lain dari partisipasi politik, menurut Jeffry M. Paige (1971), berhubungan dengan kepercayaan (dan kesadaran). Menurutnya, kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi (dan kesadaran politik tinggi) maka partisipasi politik cenderung aktif. Sebaliknya, bila kepercayaan kepada pemerintah rendah (dan kesadaran politik rendah) maka partisipasi politik cenderung pasif-tertekan atau apatis (Surbakti, 1992) dan (Gatara, 2009).

Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam penanganan Covid-19. Publik di sini adalah *civil society*, partai politik, pengusaha, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan masyarakat umum.

Kajian spesifik mengenai hubungan kepercayaan dan kebijakan publik pada masa Covid-19 pernah dilakukan oleh Felix Nathaniel dengan fokus perhatian pada dampak tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pada laju kasus corona. Nathaniel melihat bahwa kepercayaan publik adalah modal, tetapi bukan jaminan. Hal itu, ia buktikan dengan menunjukkan Indonesia yang masyarakatnya memiliki tingkat kepercayaan yang baik terhadap

pemerintah, tapi kasus Covid-19 terus meningkat. Survei tersebut misalnya dikerjakan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yang rutin menurunkan laporan tentang kebijakan negara-negara dunia dalam bidang kesejahteraan dan keuangan. Kajian terbaru berjudul *Government at Glance 2019* turut membahas aspek kepercayaan (*trust*) pada pemerintah (Nathaniel, 2020).

Hasilnya menunjukkan Indonesia memiliki tingkat kepercayaan mencapai 84%. Pertanyaan penting yang menjadi patokan penilaian adalah "Apa Anda percaya dengan pemerintah pusat?" Catatan OECD menunjukkan peningkatan yang baik.

Hasil survei yang sama dilakukan Litbang Kompas, masyarakat juga percaya bahwa pemerintah telah bekerja dengan baik dan melakukan antisipasi terhadap penyebaran virus Corona. Survei yang dilakukan pada tanggal 10 Maret 2020 ini tidak berbanding lurus dengan penambahan kasus Corona di Indonesia. Waktu 10 Maret, Indonesia hanya punya 10 kasus. Sekarang jumlah sudah meningkat berkali-kali lipat. Meski dikatakan tinggi, angkanya lebih kecil daripada survei yang dilakukan Gallup dan OECD, hanya 58,5 % (Nathaniel, 2020).

Kajian tersebut memiliki relevansi dengan kajian yang dilakukan peneliti. Relevansi terletak pada topik yang sama mengenai kepercayaan publik dan kebijakan pemerintah. Selain itu, memiliki kasus yang sama dalam penanganan krisis Covid-19. Meski demikian, ada perbedaan dalam konteks basis yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. Basis penanganan Covid-19 yang diperhatikan Felix adalah masih berbasis aparat negara, sedangkan penelitian ini pada penanganan Covid-19 berbasis masyarakat, baik sebagai wacana maupun sebagai praktik. Penelitian ini berasumsi kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah akan berdampak terhadap penurunan kasus Covid-19 yang penanganannya berbasis masyarakat. Model penanganan ini mengandaikan masyarakat menjadi garda depan dalam pencegahan kasus Covid-19.

Sebenarnya terdapat langkah-langkah nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan Covid-19 melalui PSBB. Di antaranya, terus mensosialisasikan gerakan tinggal di rumah, penyembuhan orang-orang yang positif terinfeksi, pemetaan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP), penegakan hukum dalam kerangka pemberlakuan PSBB, relaksasi pajak dan angsuran kredit bagi para pelaku bisnis, dan pembagian bantuan sosial seperti sembako dan uang tunai bagi warga terdampak.

Kendati demikian, kasus Covid-19 di wilayah-wilayah yang telah memberlakukan PSBB, paling tidak sampai saat artikel ini disusun, masih menunjukkan grafik naik. Kalau pun ada grafik penurunan, seperti di DKI Jakarta, angkanya belum signifikan dan masih fluktuatif dari hari ke harinya sebagaimana secara *real-time* ditayangkan pada website resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (Covid-19, 2020). Hal itu diduga kuat karena basis penanganannya belum berbasis masyarakat.

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Arikunto memaparkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Arikunto, 2013). Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan harapan hasil informasi yang didapatkan dapat diberlakukan secara umum yakni untuk populasi penelitian (Tarsito, 2014).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Jawa Barat yang berjumlah 46.497.175 jiwa. Penentuan jumlah sampel dihitung menggunakan metode Slovin dengan tingkat error

yang digunakan adalah sebesar 10% maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 (seratus) responden. Metode *sampling* menggunakan *clustered sampling* dengan jumlah masing-masing kluster dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1 Jumlah Sampel dalam Setiap Kluster

No	Kluster	Jumlah Sampel (responden)
1.	<i>Civil Society</i>	20
2.	Partai Politik	20
3.	Pengusaha dan/atau Pengamat Ekonomi	20
4.	ASN (Aparatur Sipil Negara)	20
5.	Masyarakat Umum	20
Total		100

Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini dituangkan dalam Tabel 2.

Tabel 2 Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Dimensi	Indikator
1.	Kepercayaan masyarakat	<i>Willingness to endorse</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Trustworthy</i> • <i>Responsiveness</i> • <i>Integrity</i>
2.		<i>Share norms and values</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Compassion and understanding</i> • <i>Worthy of pride</i>
3.		<i>Perceived efficacy</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Effectiveness</i> • <i>Reliability</i>

Sumber: (Lijeblad et al., 2009)

Uji Instrumen

Uji instrumen dalam penelitian ini mencakup uji validitas dan uji reliabilitas.

Uji Validitas

Pengujian validitas data dilakukan dengan menggunakan korelasi *Product Moment Pearson* dengan rumus sebagai berikut:

$$r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X) \cdot (\sum Y)}{\sqrt{\{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2\} \cdot \{n \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}} \dots (1)$$

(Ridwan & Sunarto, 2009)

Keterangan :

- r = Koefisien validitas butir pernyataan yang dicari
- n = Banyaknya responden
- X = Skor yang diperoleh subjek dari seluruh item
- Y = Skor total yang diperoleh dari seluruh item
- $\sum X$ = Jumlah skor dalam kontribusi X
- $\sum Y$ = Jumlah skor dalam kontribusi Y
- $\sum X^2$ = Jumlah kuadrat masing-masing X
- $\sum Y^2$ = Jumlah kuadrat masing-masing Y

Uji Reliabilitas

Ukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan mengukur *Cronbach's Alpha*. Sekaran dan Bougie menyatakan suatu instrumen dikatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar lebih dari 0,6. Adapun rumus *Alpha Cronbach* sebagai berikut (Sekaran & Bougie, 2010) :

$$r_i = \left[\frac{k}{k-1} \right] - \left[1 - \frac{\sum \sigma^2 b}{\sigma^2 t} \right] \dots (2)$$

keterangan :

- r_i = koefisien reliabilitas alpha
- k = banyaknya butir pernyataan
- $\sum \sigma^2 b$ = jumlah varian butir
- $\sum \sigma^2 t$ = varians total

Pengujian dilakukan dengan menggunakan *Statistical Package for Social Science (SPSS) for windows*.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode garis kontinum. Riduwan memaparkan bahwa garis kontinum adalah garis yang digunakan untuk menganalisa, mengukur dan menunjukkan seberapa besar tingkat kekuatan variabel yang sedang diteliti, sesuai instrumen yang digunakan. Model garis kontinum ini menggunakan perhitungan skor yang dijelaskan pada rumus berikut (Riduwan, 2015).

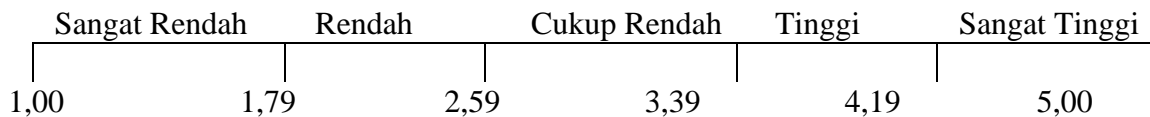
$$\text{Interval} = \frac{\text{nilai maksimal} - \text{nilai minimal}}{\text{jumlah kelas}}$$

$$\text{Interval} = \frac{5-1}{5} = 0,8$$

Dari formulasi tersebut dapat ditentukan skala distribusi kriteria pendapat responden sebagaimana dituangkan dalam Tabel 3.

Tabel 3 Rentang Nilai Jawaban Responden

No.	Rentang Nilai	Kategori
1.	1,00 – 1,79	Sangat tidak percaya
2.	1,80 – 2,59	Tidak percaya
3.	2,60 – 3,39	Kurang percaya
4.	3,40 – 4,19	Percaya
5.	4,20 – 5,00	Sangat percaya



Gambar 1 Garis Kontinum

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 4 berikut memperlihatkan hasil uji validitas kuesioner yang diperoleh dari hasil pengolahan data menggunakan *software SPSS*.

Tabel 4 Hasil Uji Validitas

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pernyataan 1	19,4100	24,729	,795	,915
Pernyataan 2	19,1000	28,434	,574	,934
Pernyataan 3	19,6400	23,970	,909	,904
Pernyataan 4	19,8000	24,303	,871	,908
Pernyataan 5	19,8200	24,311	,753	,920
Pernyataan 6	19,7600	23,841	,910	,904
Pernyataan 7	19,8100	25,448	,630	,933

Sumber : Pengolahan data menggunakan SPSS (2020)

Tabel 4 diatas memuat nilai koefisien validitas yang ditunjukkan dengan nilai *corrected item* dari setiap pernyataan. Dapat dilihat bahwa nilai koefisien validitas seluruh pernyataan memiliki nilai lebih dari 0,1996 ($r_{tabel;100-2;5\%}$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dalam alat ukur (kuesioner) yang digunakan dalam penelitian ini valid.

Tabel 5 berikut memperlihatkan hasil uji reliabilitas kuesioner yang diperoleh dari hasil pengolahan data menggunakan *software* SPSS.

Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
,929	7

Hasil uji reliabilitas dapat dilihat dari nilai *Cronbach's Alpha*. Dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dalam Tabel 5 memiliki nilai 0,930 yang lebih besar dari 0,6. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alat ukur (kuesioner) yang digunakan dalam penelitian ini reliabel.

1.2 Analisis Deskriptif Tanggapan Responden

Hasil analisis deskriptif tanggapan responden per kluster beserta penentuan kriteria menggunakan metode garis kontinum dapat dilihat dalam Tabel 6 sampai dengan Tabel 11.

Tabel 6 Hasil Analisis Deskriptif Tanggapan Responden Kluster *Civil Society*

No	Pernyataan	Dimensi	Tanggapan					Total Responden	Total Skor	Rata-rata	Kriteria
			STS	TS	KS	S	SS				
1	Responden mempercayakan penanganan Covid19 kepada Pemerintah (Pernyataan 1)	<i>Willingness to endorse</i>	1	5	10	4	0	20	57	2,85	Kurang percaya
2	Responden mendukung setiap program pencegahan dan penuntasan Covid19 yang dicanangkan Pemerintah (Pernyataan 2)		0	1	12	6	1	20	67	3,35	Kurang percaya
3	Responden menganggap Pemerintah mampu menyelesaikan persoalan sebagai dampak dari kasus Covid19 (Pernyataan 3)		1	7	9	3	0	20	54	2,7	Kurang percaya
4	Responden percaya Pejabat Pemerintah tidak akan melakukan penyelewengan kekuasaannya dalam menangani kasus Covid19 (Pernyataan 4)	<i>Share norms and values</i>	1	9	9	1	0	20	50	2,5	Tidak percaya
5	Responden percaya bahwa Pemerintah dapat terbuka dalam melakukan pengelolaan dana darurat penanganan Covid19 (Pernyataan 5)		3	5	11	0	1	20	51	2,55	Tidak percaya
6	Pemerintah sampai saat ini telah memberikan beberapa kebijakan yang meringankan beban masyarakat (Pernyataan 6)	<i>Perceived efficacy</i>	2	6	12	0	0	20	50	2,5	Tidak percaya
7	Pemerintah menyediakan layanan informasi yang memudahkan masyarakat mengakses perkembangan kasus Covid19 (Pernyataan 7).		2	7	9	2	0	20	51	2,55	Tidak percaya
Rata-rata									2,71	Kurang percaya	

Sumber : Hasil penyebaran kuesioner, data diolah (2020)

Dari Tabel 6 dapat dilihat bahwa tingkat kepercayaan masyarakat untuk kluster *Civil Society* termasuk dalam kategori “Kurang percaya”.

Tabel 7 Hasil Analisis Deskriptif Tanggapan Responden Kluster Partai Politik

No	Pernyataan	Dimensi	Tanggapan					Total Responden	Total Skor	Rata-rata	Kriteria
			STS	TS	KS	S	SS				
1	Pernyataan 1	<i>Willingness to endorse</i>	0	2	3	15	0	20	73	3,65	Percaya
2	Pernyataan 2		0	0	6	12	2	20	76	3,80	Percaya
3	Pernyataan 3		0	2	6	12	0	20	70	3,50	Percaya
4	Pernyataan 4	<i>Share norms and values</i>	0	5	6	9	0	20	64	3,20	Kurang percaya
5	Pernyataan 5		0	2	8	8	2	20	70	3,50	Percaya
6	Pernyataan 6	<i>Perceived efficacy</i>	0	2	6	12	0	20	70	3,50	Percaya
7	Pernyataan 7		2	6	8	4	0	20	54	2,70	Kurang percaya
Rata-rata									3,41	Percaya	

Sumber : Hasil penyebaran kuesioner, data diolah (2020)

Tabel 8 Hasil Analisis Deskriptif Tanggapan Responden Kluster Pengusaha dan/atau Pengamat Ekonomi

No	Pernyataan	Dimensi	Tanggapan					Total Responden	Total Skor	Rata-rata	Kriteria
			STS	TS	KS	S	SS				
1	Pernyataan 1	<i>Willingness to endorse</i>	2	4	10	4	0	20	56	2,80	Kurang percaya
2	Pernyataan 2		0	2	8	8	2	20	70	3,50	Percaya
3	Pernyataan 3		2	8	10	0	0	20	48	2,40	Tidak Percaya
4	Pernyataan 4	<i>Share norms and values</i>	2	6	10	2	0	20	52	2,60	Kurang percaya
5	Pernyataan 5		6	4	8	0	2	20	48	2,40	Tidak Percaya
6	Pernyataan 6	<i>Perceived efficacy</i>	4	6	10	0	0	20	46	2,30	Tidak Percaya
7	Pernyataan 7		4	8	6	2	0	20	46	2,30	Tidak Percaya
Rata-rata									2,61	Kurang percaya	

Sumber : Hasil penyebaran kuesioner, data diolah (2020)

Dari Tabel 8 dapat dilihat bahwa tingkat kepercayaan masyarakat untuk kluster Pengusaha dan/atau Pengamat Ekonomi termasuk dalam kategori “Kurang percaya”.

Tabel 9 Hasil Analisis Deskriptif Tanggapan Responden Kluster ASN

No	Pernyataan	Dimensi	Tanggapan					Total Responden	Total Skor	Rata-rata	Kriteria
			STS	TS	KS	S	SS				
1	Pernyataan 1	<i>Willingness to endorse</i>	0	0	3	4	13	20	90	4,50	Sangat percaya
2	Pernyataan 2		0	1	1	11	7	20	84	4,20	Sangat percaya
3	Pernyataan 3		0	0	4	9	7	20	83	4,15	Percaya
4	Pernyataan 4	<i>Share norms and values</i>	1	0	3	10	6	20	80	4,00	Percaya
5	Pernyataan 5		1	1	8	4	6	20	73	3,65	Percaya
6	Pernyataan 6	<i>Perceived efficacy</i>	0	1	1	12	6	20	83	4,15	Percaya
7	Pernyataan 7		0	0	2	7	11	20	89	4,45	Sangat percaya
Rata-rata									4,16	Percaya	

Sumber : Hasil penyebaran kuesioner, data diolah (2020)

Dari Tabel 9 dapat dilihat bahwa tingkat kepercayaan masyarakat untuk kluster ASN termasuk dalam kategori “percaya”.

Tabel 10 Hasil Analisis Deskriptif Tanggapan Responden Kluster Masyarakat Umum

No	Pernyataan	Dimensi	Tanggapan					Total Responden	Total Skor	Rata-rata	Kriteria
			STS	TS	KS	S	SS				
1	Pernyataan 1	<i>Willingness to endorse</i>	1	1	3	15	0	20	72	3,60	Percaya
2	Pernyataan 2		0	0	2	14	4	20	82	4,10	Percaya
3	Pernyataan 3		1	0	9	8	2	20	70	3,50	Percaya
4	Pernyataan 4	<i>Share norms and values</i>	1	2	10	7	0	20	63	3,15	Kurang percaya
5	Pernyataan 5		1	0	12	7	0	20	65	3,25	Kurang percaya
6	Pernyataan 6	<i>Perceived efficacy</i>	1	1	11	7	0	20	64	3,20	Kurang percaya
7	Pernyataan 7		0	0	12	8	0	20	68	3,40	Percaya
Rata-rata									3,46	Percaya	

Sumber : Hasil penyebaran kuesioner, data diolah (2020)

Dari Tabel 10 dapat dilihat bahwa tingkat kepercayaan masyarakat untuk kluster masyarakat umum termasuk dalam kategori “Percaya”.

Tabel 11 Hasil Analisis Deskriptif Tanggapan Semua Kluster Responden

No	Kluster	Rata-rata Skor	Kriteria
1	<i>Civil Society</i>	2,71	Kurang percaya
2	Partai Politik	3,41	Percaya
3	Pengusaha dan/atau pengamat ekonomi	2,61	Kurang percaya
4	ASN	4,16	Percaya
5	Masyarakat Umum	3,46	Percaya
Rata-rata		3,27	Kurang percaya

Sumber : Hasil penyebaran kuesioner, data diolah (2020)

Dari Tabel 11 dapat dilihat bahwa tingkat kepercayaan masyarakat untuk semua kluster masyarakat termasuk dalam kategori “Kurang Percaya”.

1.3 Pembahasan

Hal-hal yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 berbasis masyarakat, penanganan dalam bentuk pencegahan dengan masyarakat berada pada garda depan, sebagaimana disebutkan di bagian pendahuluan, merupakan sesuatu yang dihasilkan dari kepercayaan publik terhadap pemerintah. Artinya, keterlibatan segenap masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah.

Demikian juga, kepercayaan publik terhadap pemerintah berhubungan dengan aktivitas pemerintah sebagai faktor pengaruh. Aktivitas yang menghasilkan suatu rumusan kebijakan (pernyataan mengenai tujuan yang hendak dicapai) yang menyangkut internal pemerintahan maupun yang menyangkut masyarakat umum. Di samping itu, pelaksanaan kebijakan yang mencakup upaya-upaya penyediaan sumber daya bagi pelaksanaan kebijakan, membuat peraturan, pengorganisasian pelaksanaan, dan memberikan pelayanan dan kemanfaatan (Surbakti, 1992).

Analisis tentang tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam penanganan Covid-19 disajikan melalui tujuh pertanyaan sebagai indikator, yaitu mempercayakan penanganan Covid-19 kepada pemerintah; Mendukung setiap program pencegahan dan penuntasan Covid-19 yang dicanangkan pemerintah; Pemerintah mampu menyelesaikan

persoalan sebagai dampak dari covid-19; Percaya pemerintah tidak akan melakukan penyelewengan kekuasaannya dalam menangani Covid-19; Pemerintah dapat terbuka dalam melakukan pengelolaan dana darurat Covid-19; Pemerintah telah memberikan beberapa kebijakan yang meringankan beban masyarakat ketika Covid-19; Dan pemerintah menyediakan layanan informasi yang memudahkan masyarakat mengakses perkembangan kasus Covid-19.

Dengan tujuh indikator tersebut, secara umum masyarakat, sebagaimana tergambar dalam tabel 11, kurang percaya terhadap pemerintah dalam penanganan Covid-19. Ini artinya tingkat kepercayaan masyarakat cukup rendah. Hasil survei tersebut tentu berbeda dengan hasil survei yang dilakukan OCED dan Litbang Kompas sebagaimana disampaikan di bagian pendahuluan. Kelompok atau kluster yang memberikan kontribusi besar terhadap kurang percayanya masyarakat terhadap pemerintah adalah kluster *civil society* dan pengusaha. Ini tentu menjadi tantangan bagi semua pihak, termasuk pihak pemerintah, untuk menumbuhkan tingkat kepercayaan mereka. Sementara, kluster lainnya menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi atau percaya. Adapun pembahasan adalah berikut ini.

Dari hasil analisis deksriptif tanggapan kluster partai politik dalam Tabel 7 dapat dilihat bahwa parta politik percaya terhadap pemerintah dalam menangani wabah Covid-19. Hal ini menggambarkan postur koalisi partai politik pendukung pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Data dan gambaran tersebut menegaskan terhadap kajian Jeffry M. Paige mengenai model-model partisipasi politik dalam bukunya *Political Orientation and Riot Participation* (Paige, 1971), yang di antaranya mengatakan bahwa kepercayaan (dan kesadaran) itu bukan faktor yang berdiri sendiri. Artinya, tinggi-rendahnya kepercayaan dipengaruhi faktor-faktor lain. Di antaranya adalah faktor afiliasi partai politik.

Di sini kepercayaan publik kepada pemerintah sebagai variabel antara atau *intervening variables*. Lalu, keterlibatan masyarakat dikategorikan sebagai variabel terpengaruh atau variabel dependen. Dan, afiliasi politik sebagai variabel pengaruh atau variabel independen (Surbakti, 1992).

Koalisi partai politik pendukung pemerintah memberi kontribusi pada kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam menangani Covid-19, meskipun kontribusi tersebut tidak berdiri sendiri. Dalam kepercayaan publik terhadap pemerintah, partai-partai politik tidak memiliki peran kapasitas dan fungsi sebagai penggerak keyakinan masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah, tetapi justru partai-partai politik meyakini kemampuan komunikasi yang disampaikan pemerintah dapat menggerakkan secara optimal kepada masyarakat, sehingga partai politik mempercayai apa yang diputuskan oleh pemerintah.

Implikasi kuatnya koalisi partai politik pendukung pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, memudahkan bagi pemimpin pemerintahan, Presiden, gubernur dan bupati/walikota, untuk mendekati masyarakat dalam upaya mengambil kebijakan terutama berhubungan dalam menangani wabah Covid-19. Sehingga, sebagaimana diperoleh hasil dalam Tabel 10, bahwa masyarakat umum percaya terhadap pemerintahan. Pendekatan yang dilakukan bisa melalui sajian program-program populis atau program pemerintah yang pro-rakyat.

Dalam hal kepercayaan publik pemerintah dalam menangani terhadap Covid-19 ini, terdapat juga fakta yang menarik karena ternyata kedekatan pimpinan pemerintah, seperti presiden dan gubernur, dengan kekuatan-kekuatan sosial yang tersebar di masyarakat baik yang ada di organisasi masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Perguruan Tinggi (PT), tidak berbanding lurus dengan kepercayaan publik yang diperolehnya.

Hal itu setidaknya tergambar pada hasil analisis tingkat percayaaan publik dalam Tabel 6, kluster *civil society* yang menunjukkan kategori masih cukup rendah atau kurang percaya terhadap pemerintah. Padahal, dalam kapasitas sebagai pemimpin negara atau pemimpin daerah, presiden atau pun gubernur, sejatinya dapat memanfaatkan posisinya sebagai pelindung organisasi masyarakat, LSM dan perguruan tinggi sebagai salah satu wujud dari *civil society*.

Pemimpin daerah, seperti gubernur atau bupati/walikota, sebenarnya selalu memosisikan sebagai patron dalam hubungan patronase dengan tokoh-tokoh ormas, LSM dan perguruan tinggi sebagai kliennya. Pada akhirnya hubungan patronase yang terbangun tersebut telah memberi kontribusi dengan angka tertentu terhadap Kepercayaan publik dalam menangani berbagai kebijakan terutama yang berhubungan dengan menangani kebijakan Covid-19 dan juga sebagai dukungan tokoh-tokoh masyarakat menjadi kekuatan penggerak dalam upaya memobilisasi dukungan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Kluster selanjutnya yang belum sepenuhnya menaruh kepercayaan terhadap pemerintah berasal dari kluster pengusaha dan/atau pengamat ekonomi sebagaimana diperoleh dalam hasil analisis dalam Tabel 8. Bahwa para pelaku usaha ini menunjukkan kurang percaya terhadap pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Data ini berbeda dengan kajian Paige (1971) di atas yang mengatakan bahwa faktor status ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tinggi memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah. Ini dapat menggambarkan bahwa selama ini, sepanjang penerapan PSBB, para pelaku usaha, baik usaha kecil, menengah maupun besar, tengah mengalami penurunan kekayaan atau pendapatannya. Sehingga mereka lebih sibuk untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya seraya berharap adanya intervensi kebijakan pemerintah yang berpihak kepada mereka. Adapun kebijakan yang telah pemerintah terbitkan belum dirasa belum ada dampak positif bagi para pelaku usaha.

Sementara itu, sebagaimana hasil yang diperoleh dalam Tabel 10, bahwa masyarakat umum percaya terhadap pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hal serupa juga ini tingkat kepercayaan ASN terhadap pemerintah yang tinggi, sebagaimana hasil yang dapat dilihat dalam Tabel 9. Hubungan Birokrat dan Pemerintah begitu mengesankan, karena Birokrat yang didalamnya ada ASN merasa apa yang dilakukan pemerintah ini sudah sangat tepat dilakukan dengan berbagai konsekuensi yang akan dihadapi (Mufti, 2013).

Tingginya kepercayaan masyarakat umum dan ASN terhadap pemerintah tidak terlepas, bila meminjam pandangan Francis Fukuyama, adanya harapan yang tumbuh di dalam lingkungan mereka karena masih adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Pemerintah telah berhasil menciptakan harapan terbaik dengan keteraturan (Fukuyama, 1995). Ini, artinya masyarakat umum menilai di lingkungan pemerintah masih ada keterbukaan atau kejujuran dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan PSBB.

Dalam perspektif literasi politik, masyarakat umum dan ASN memiliki kepercayaan tinggi kepada pemerintah karena telah memiliki pengetahuan kemasyarakatan dan kenegaraan yang memadai ketika melakoni kehidupan sehari-harinya. Pada sisi yang lain, pengetahuan tersebut membantu masyarakat ketika berpartisipasi politik dalam kebijakan apapun (Sahid & Nurjaman, 2017), termasuk kebijakan Pemilu, Pilkada, dan kebijakan PSBB seperti sekarang ini.

Sementara itu, menurut Robert Putnam (Putnam et al., 1994), sebagaimana dikutip Rusydi Syahra, kepercayaan memiliki implikasi positif dalam kehidupan masyarakat. Hal itu dibuktikan suatu kenyataan bagaimana keterkaitan antara orang-orang yang memiliki saling percaya (*mutual trust*) dalam suatu jaringan sosial memperkuat norma-norma mengenai keharusan untuk saling membantu. Kepercayaan dalam pandangan Putnam tersebut berkaitan dengan hubungan horizontal antara masyarakat (Syahra, 2003). Kendati demikian, dalam konteks ini peneliti melihat, kepercayaan, khususnya kepercayaan publik, juga ada relevansinya dalam hubungan vertikal antara masyarakat dengan pemerintah.

Disini kepercayaan publik adalah sebagai modal politik (*political capital*). Kepercayaan publik menjadi sarana mempermudah lahir dan hadirnya kebijakan pemerintah untuk mendapatkan kepatuhan dan kebaikan bersama. Politik (ilmu politik) itu sendiri bukan hanya sebagai jalan menuju kekuasaan, namun juga jalan menuju pengabdian dalam kehidupan

bernegara (Engkus et al., 2019). Pengabdian bernegara dalam bentuk kepercayaan dan perumusan, penetapan serta pelaksanaan kebijakan publik.

Oleh karena itu, kepercayaan, baik kepercayaan individu maupun publik, dalam konteks kekuatan politik adalah sumber daya politik yang dimiliki oleh individu atau institusi yang memiliki moralitas, religius, kebenaran, legitimasi, dan kewenangan. Sumber daya politik tersebut, menurut pandangan Charles F. Andrain (1970) merupakan bagian dari sumber daya normatif (Gatara, 2009). Dan, sumber daya normatif tersebut sifatnya adalah potensi sehingga siapa yang memilikinya berarti ia mendapatkan kekuasaan potensial. Namun, bila sumber daya itu didayagunakan atau diaktualisasikan dalam politik empirik, maka ia mendapatkan kekuasaan aktual.

Oleh karena itu, kepercayaan kepada pemerintah tidak serta merta berubah menjadi partisipasi masyarakat yang tinggi. Melainkan harus melalui proses pendayagunaan atau pengaktualisasian melalui sarana-sarana. Demikian juga, tingkat kepercayaan yang tinggi atau sangat tinggi terhadap pemerintah dalam penanganan Covid-19 belum bisa dikatakan seseorang atau sekelompok orang telah otomatis berpartisipasi. Sebelumnya diperlukan semacam seruan atau himbauan kepada mereka untuk terlibat dalam pencegahan Covid-19. Inilah proses kepercayaan kepada pemerintah sebagai potensi menjadi fungsi. Artinya, dari kepercayaan publik potensial berubah menjadi kepercayaan publik aktual ketika masyarakat mau terlibat dalam segala kebijakan yang ditetapkan dan diberlakukan pemerintah.

SIMPULAN

Dari analisis tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam penanganan Covid-19 menunjukkan bahwa umumnya tingkat kepercayaan yang cukup rendah atau kurang percaya. Namun demikian, masyarakat partai politik, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat umum menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi atau percaya. Faktor yang turut menjadi determinasi tingkat kepercayaan tersebut adalah peran dan kemampuan pemerintah, baik pusat maupun daerah, sebagai aktor politik pengambil sekaligus pelaksana kebijakan yang dipilih untuk menghentikan pandemi Covid-19. Berdasarkan itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan penanganan Covid-19 melalui peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai kekuatan politik. Kekuatan yang bertugas meramu atau mengelola berbagai unsur dalam masyarakat dan ragam kepentingan, serta mengintervensi dengan kebijakan efektif agar tujuan percepatan penanganan Covid-19 tercapai. Upaya tersebut dengan menunjukkan kinerja pemerintah yang baik dalam pelaksanaan PSBB. Kinerja pemerintah yang baik akan menghasilkan kepercayaan publik yang tinggi. Dan, kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah akan menghasilkan keterlibatan atau partisipasi masyarakat yang tinggi. Partisipasi masyarakat yang tinggi akan membuat implementasi kebijakan publik efektif.

REFERENSI

- Arikunto, S. (2013). Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.
Covid-19, G. T. P. P. (2020). *Data Sebaran*. BNPB. <https://covid19.go.id/peta-sebaran>
- Engkus, E., Suparman, N., Trisakti, F., & Lestari, F. (2019). Policy Implication of Single Candidates in Regional Head Election on Voter Participation in Tasikmalaya District. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 1(1), 1–23.
- Fukuyama, F. (1995). *Trust: The social virtues and the creation of prosperity* (Vol. 99). Free press New York.
- Gatara, A. S. (2009). *Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan*. Pustaka Setia.
- Laswanto, C. (2020). *Pelaksanaan PSBB belum Efektif*. <https://mediaindonesia.com/read/detail/306369-pelaksanaan-psbb-belum-efektif>

- Lijebblad, A., Borrie, W. T., & Watson, A. E. (2009). Determinants of trust for public lands: fire and fuels management on the Bitterroot National Forest. *Environmental Management*, 43(4), 571–584.
- Mufti, M. (2013). *Kekuatan politik di Indonesia*. CV. Pustaka Setia.
- Nathaniel, F. (2020). *Tingkat Kepercayaan pada Negara: Modal Penting Penanganan COVID-19*. Tirto.Id. <https://tirto.id/tingkat-kepercayaan-pada-negara-modal-penting-penanganan-covid-19-eJVn>
- Paige, J. M. (1971). Political Orientation and Riot Participation. In *American Sociological Review*.
- Putnam, R. D., Leonardi, R., & Nanetti, R. Y. (1994). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton university press.
- Riduwan. (2015). *Dasar-dasar Statistika*. Alfabeta.
- Ridwan & Sunarto, H. (2009). *Pengantar Statistika: Untuk Penelitian*. Rifki Afandi, Pengembangan Media Pembelajaran Permainan Ular Tangga Untuk.
- Ripley, R. B. (1985). *Policy analysis in political science*. Wadsworth Publishing Company.
- Sahid, A. A., & Nurjaman, K. (2017). LITERASI POLITIK MASYARAKAT PESISIR DAN MANAJEMEN PARTAI POLITIK. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(2), 137–157.
- Satria, A. (2020). Sains dan Disrupsi Covid-19. *Tempo.Co*. <https://majalah.tempo.co/read/laporan-khusus/160320/peran-kampus-di-masa-pandemi-covid-19>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2010). *Research for Business—A Skill Building Approach*. John-Wiley and Sons, New York, NY.
- Soesatyo, B. (2020). *Bamsoet Nilai Pelaksanaan PSBB Jabodetabek Belum Efektif*. <https://republika.co.id/berita/q9i6yu354/bamsoet-nilai-pelaksanaan-psbb-jabodetabek-belum-efektif>
- Surbakti, R. (1992). *Memahami ilmu politik*. Grasindo.
- Syakra, R. (2003). Modal sosial: Konsep dan aplikasi. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 5(1), 1–22.
- Tarsito, S. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.